Isu Sepekan
Bidang Polhukam, Komisi XIII
Minggu ke-4 Agustus
(25 s.d.31 Agustus 2025)
2025

BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging research to parliament
Evidence based policy making

KERJA SAMA KPK DAN IMIPAS MENGATASI OVERKAPASITAS RUTAN KPK

Puteri Hikmawati
Analis Legislatif Ahli Utama
puteri.hikmawati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi di sepanjang tahun 2025 menimbulkan masalah baru. Saat ini Rumah Tahanan (Rutan) KPK mengalami overkapasitas (kelebihan kapasitas). Juru bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa ada dua Rutan KPK, yaitu Rutan Gedung Merah Putih (K4) dan Rutan Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (C1) yang telah kelebihan kapasitas. Dua rutan ini memiliki kapasitas 51 orang, namun kini diisi 57 orang. Meskipun demikian, Budi memastikan pengelolaan rutan tersebut tetap sesuai dengan standar ketentuan dan melindungi hak-hak dasar tahanan.

Kondisi rutan yang overkapasitas tidak menghalangi KPK untuk terus membongkar kasus korupsi dan menahan para tersangka. Penuhnya rutan ini juga menjadi cerminan bahwa KPK giat dalam memberantas korupsi, namun hal ini juga merefleksikan keterbatasan infrastruktur peradilan pidana.

Untuk menyiasati hal tersebut, pengelola Rutan KPK mengambil langkah darurat dengan memanfaatkan ruang isolasi untuk menampung enam orang lainnya. Hal ini dilakukan agar proses hukum berjalan sesuai dengan standar. Budi menjelaskan masalah kepadatan rutan yang saat ini dialami lembaganya bisa diatasi dengan menjalin koordinasi bersama lembaga lain. Menurutnya, salah satu langkah yang mungkin ditempuh KPK adalah menitipkan tahanan di tempat berbeda. KPK dapat bekerja sama dengan pihak lain, seperti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) dan kepolisian untuk melakukan titip rawat penahanan. Adapun KPK pernah menggunakan rutan di Pomdam Jaya Guntur dan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal) sebagai alternatif. Namun, kedua fasilitas tersebut telah dinonaktifkan sejak April 2024.

Menteri Imipas, Agus Andrianto, mengatakan pihaknya siap mengakomodasi permintaan KPK untuk menampung tahanan meskipun kondisi rutan negara saat ini mengalami overkapasitas. Tahanan KPK akan ditempatkan di lokasi yang sesuai dengan permintaan dari KPK. Menurut Agus, koordinasi antarlembaga penegak hukum harus tetap berjalan demi menjaga kelancaran proses hukum. Ia menekankan Kementerian Imipas tidak akan menutup ruang kerja sama, apalagi menyangkut penegakan hukum di tingkat nasional. Lebih lanjut Agus mengungkapkan, bahwa pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) baru tengah diproses. Program ini merupakan bagian dari anggaran tahun berjalan yang bersifat *multiyears*. Pembangunan lapas baru juga dilakukan untuk menjawab persoalan overkapasitas di rutan dan lapas.

Data terbaru menunjukkan bahwa kapasitas lapas yang idealnya menampung sekitar 140 ribu narapidana, kini harus menampung hingga 179 ribu narapidana. Hal ini memengaruhi efektivias pembinaan dan pemenuhan hak dasar para narapidana. Pemerintah merespons kondisi ini dengan membangun 13 lapas baru, salah satu di antaranya dirancang sebagai lapas *super maximum security* di Pulau Nusakambangan. Sisanya akan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Upaya ini penting sebagai langkah jangka panjang untuk mengurangi beban di lapas-lapas yang sudah tidak layak tampung.

Atensi DPR

Masalah overkapasitas lapas menjadi persoalan yang masih belum dapat tertangani oleh pemerintah. Hal ini karena sebagian besar lapas di Indonesia tidak mampu menampung banyaknya narapidana yang menjalankan hukuman. Terjadinya overkapasitas lapas dapat berdampak pada pengelolaan lapas, dimana dengan kondisi banyaknya narapidana di lapas dan kurangnya sipir/petugas lapas, dapat berpengaruh pada kondisi keamanan, ketertiban, dan keselamatan bagi narapidana dan/atau sipir/petugas lapas untuk mengontrol aktivitas narapidana. Dengan adanya rencana kerja sama KPK dan Kementerian Imipas terkait titipan tahanan dari KPK, DPR RI melalui Komisi XIII, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, dalam rapat kerja dengan Menteri Imipas perlu menanyakan perkembangan kerja sama dengan KPK dalam penitipan tahanan KPK dan rencana Kementerian Imipas menempatkan tahanan tersebut, mengingat Kementerian Imipas juga mengalami overkapasitas rutan/lapas. Dalam kesempatan tersebut, Komisi XIII DPR RI juga perlu menanyakan perkembangan pembangunan 13 lapas baru dan lokasi, serta pengelolaannya.

Sumber

beritanasional.com, 28 Agustus 2025;
mahkamahagung.go.id, 24 Juni 2025;
metrotvnews.com, 29 Agustus 2025;
news.detik.com, 29 Agustus 2025;
rm.id, 28 Agustus 2025; dan
tribunnews.com, 29 Agustus 2025.

Minggu ke-4 Agustus
(25 s.d. 31 Agustus 2025)

2025

IsuSepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam
Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa

https://pusaka.dpr.go.id
@pusaka_bkdprri
©PusakaBK2025
Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making